



**KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME:
MEMPERTEGAS PERAN MK DALAM UPAYA MEMBANGUN
KONSTITUSIONALITAS DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI DEMI
MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**

HANI ADHANI

PANITERA PENGGANTI MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

***E-MAIL: ADHANIHANI@GMAIL.COM,**



VIDEO TENTANG PENTINGNYA KONSTITUSI

1. WHY DO CONSTITUTION MATTER?

>>> https://youtu.be/EeWfe2eZ_CI

2. WHAT IS CONSTITUTION? >>>

<https://youtu.be/0UzKD8rZCc0>

3. how are constitution made? >>>

<https://youtu.be/J36s0MTTxc8>

PENGERTIAN /DEFINISI

KONSTITUSI BERASAL KATA DARI BAHASA LATIN “CONSTITUTIO” BERKAITAN DENGAN “JUS” ATAU “IUS” >> HUKUM ATAU PRINSIP.

– BELANDA : CONSTITUTIE =/GRONDWET (UUD), – JERMAN : VERFASSUNG =/ GRUNDGESETZ (UUD)

– PERANCIS : DROIT CONSTITUTIONNEL, – INGGRIS : CONSTITUTION

OXFORD DICTIONARY OF LAW: “THE RULES AND PRACTICES THAT DETERMINE THE COMPOSITION AND FUNCTION OF THE ORGANS OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT IN A STATE AND REGULATE THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND THE STATE”

KBBI : SEGALA KETENTUAN DAN ATURAN TERKAIT KETATANEGARAAN.

KONSTITUSIONALISME MERUPAKAN SUATU PAHAM MENGENAI PEMBATASAN KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK-HAK RAKYAT MELALUI KONSTITUSI (KBBI, 1991)

KONSTITUSIONALISME ADALAH SEBUAH PROSES HUKUM DALAM SISTEM KENEGARAAN (DANIEL S. LEV, 1990)

INTINYA: PEMBATASAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA MELALUI HUKUM DAN KONSTITUSI .

PROFIL INDONESIA

**Nama : Republik
Indonesia**

**Bahasa : Bahasa
Indonesia, +300
bahasa daerah**

**Lagu Kebangsaan :
Indonesia Raya**

**Bentuk Negara :
Negara Kesatuan
Republik Indonesia**

**Prinsip
kebangsaan :
pancasila**

**UUD : UUD 1945
dengan 4
amandemen**

**Provinsi : 38
Provinsi (Aceh
hingga Papua)**

**Agama : Islam
(80%), Kristen,
Katolik, Hindu,
Budha, Konghucu.**

CONT...

Populasi : 270 juta

Pulau : 17.000

Ibukota : Jakarta

**Kota Terkenal : Bali, Lombok,
Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Makasar, Medan,
Batam, Padang, Banda Aceh,
Palembang.**

Mata uang : Rupiah

**Jumlah suku bangsa : 1.340
(Jawa, Sunda, Batak, Ambon,
Madura, Papua, Aceh, dll)**

**Semboyan negara : Bhineka
Tunggal Ika (Bhinneka
Tunggal Ika)**

**Tanggal Kemerdekaan : 17
Agustus 1945**

INDONESIA

TOTAL AREA OF 1,905 MILLION KM²



PERAN KONSTITUSI

- **KONSTITUSI DIAKUI SEBAGAI KERANGKA KERJA SEBUAH BANGSA YANG DENGANNYA LANGKAH BESAR SEBUAH BANGSA AKAN DITENTUKAN.**
- **SEBUAH KONSTITUSI MENJADI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM.**
- **KONSTITUSI MENGATUR BUNYI, SEMANGAT, DAN KERANGKA KERJA MENYELURUH YANG MENJADI DASAR LEGITIMASI SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG LAIN DAN SELURUH BENTUK PEMERINTAHAN.**
- **KONSTITUSI MENJAMIN KERANGKA KERJA SISTEM HUKUM DAN POLITIK DAN FIGUR MENDASAR SEBUAH BANGSA.**
- **KONSTITUSI YANG MENENTUKAN DAN MENGATUR KEKUASAAN DAN HUBUNGAN ANTARA KEPRESIDENAN, LEMBAGA LEGISLATIF, DAN LEMBAGA PERADILAN.**
- **DALAM HAL PEMERINTAHAN BERSIFAT DESENTRALISASI, KONSTITUSI JUGA MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH, DAN ANTARA PEMERINTAH DI DAERAH.**
- **KONSTITUSI MERUPAKAN “OTOBIOGRAFI SUATU BANGSA”**

PERAN KONSTITUSI PADA MASA ORDE BARU

- **PADA MASA ORDE BARU BANYAK PUJIAN TERHADAP “PEMBANGUNAN EKONOMI YANG CEPAT” DAN PENGAKUAN STATUS INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU DARI MACAN ASIA, SEMENTARA DASAR BAGI PEMBANGUNAN TERSEBUT JELAS-JELAS TIDAK STABIL.**
- **KETIKA EKONOMI MELOROT SELAMA KRISIS MONETER DI ASIA, TERUNGKAPLAH BAHWA PONDASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TERNYATA RAPUH, JUMLAH UTANG BANGSA SANGAT BESAR, DAN TINGKAT KORUPSI MENEROGOTI SELURUH SISTEM.**
- **TIDAK ADANYA TRANSPARANSI PADA PEMERINTAHAN DAN TIDAK ADA MEKANISME UNTUK AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI LEMBAGA LEGISLATIF NASIONAL, PERS ATAU MELALUI KOMISI-KOMISI KHUSUS YANG BERWENANG.**
- **BANYAK PRAKTIK-PRAKTIK BISNIS YANG PALSU, BERTUMPUKNYA UTANG-UTANG YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP WAKTU. SEHINGGA, KEBOBROKAN EKONOMI INDONESIA BERDAMPAK SANGAT BESAR PADA RAKYATNYA**

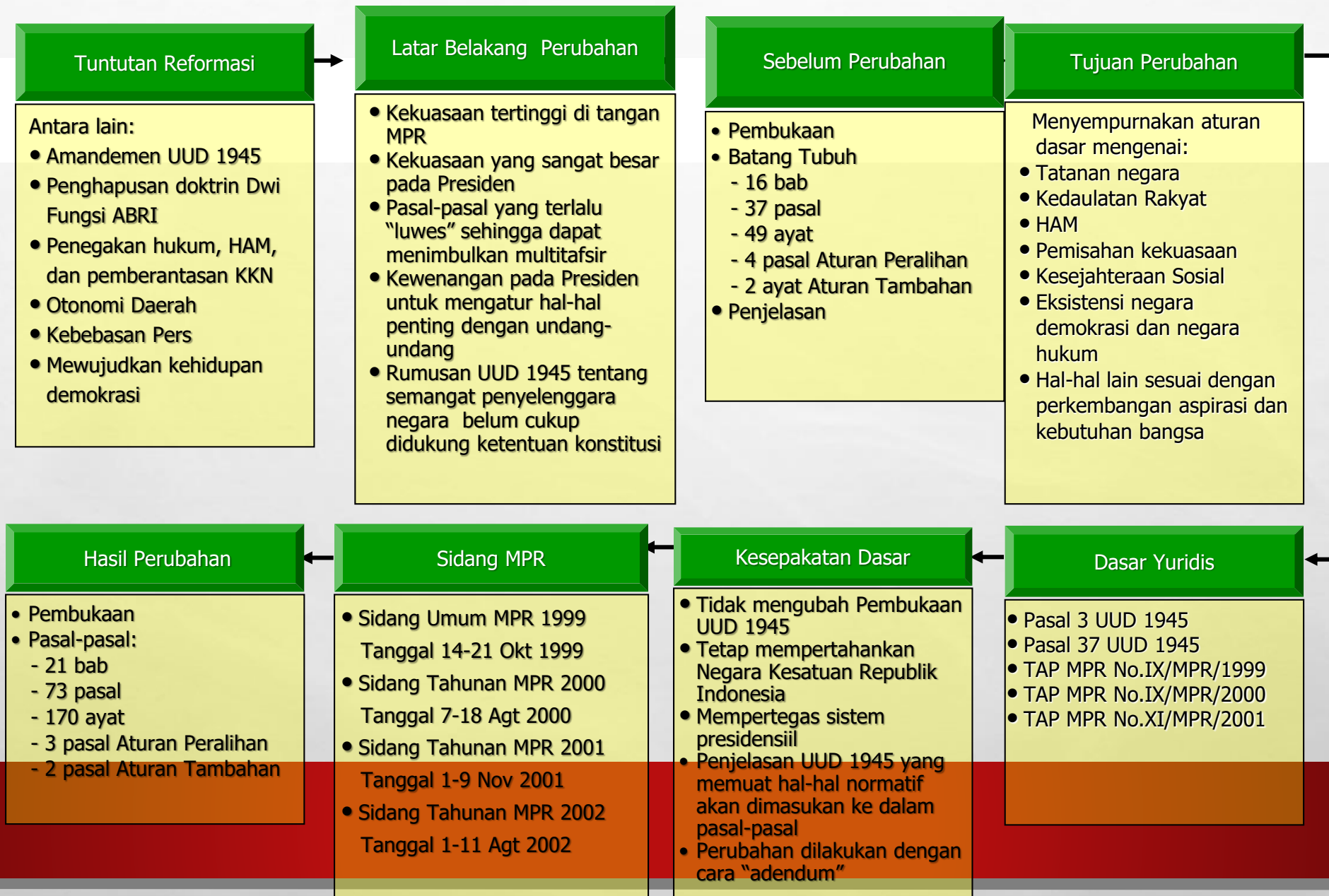
REFORMASI DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

- **UUD 1945 DI ERA SOEHARTO MENJADI ALAT STATUS QUO KARENA TIDAK ADA PEMBatasan KEKUASAAN PRESIDEN.**
- **SOEHARTO TINGGAL DI KANTORNYA SELAMA 32 TAHUN DAN MENJADI KORUP DAN OTORITER.**
- **PADA BULAN MEI 1998 KARENA EKONOMI INDONESIA RUNTUH DAN SELURUH RAKYAT DAN MAHASISWA MELAKUKAN DEMONSTRASI, AKHIRNYA SOEHARTO MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA DAN SECARA OTOMATIS WAKIL PRESIDEN (BJ HABIBIE) MENJADI PRESIDEN.**
- **AGENDA HABIBIE HANYA MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999**
- **PEMILU 1999 MENJADI PEMILU PERTAMA YANG BEBAS DAN JUJUR SETELAH ERA SOEHARTO.**
- **ANGGOTA KONGRES BARU HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 BERTUGAS MENGAMANDEMEN UUD 1945.**

CONT...

- **KONGRES/MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TELAH MENETAPKAN 5 KESEPAKATAN POKOK PERUBAHAN UUD 1945 (UUD 1945) YAITU: 1) TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945, 2) MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 3) MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, 4) MEMASUKKAN PENJELASAN UUD 1945 YANG MEMUAT HAL-HAL NORMATIF KE DALAM PASAL-PASAL, 5) MELAKUKAN PERUBAHAN MELALUI PENAMBAHAN.**
- **PROSES PERUBAHAN: AMANDEMEN PERTAMA TAHUN 1999, AMANDEMEN KEDUA TAHUN 2000, AMANDEMEN KETIGA TAHUN 2001 DAN AMANDEMEN KEEMPAT TAHUN 2002.**

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



PERDEBATAN KONSTITUSIONAL

Ada tiga kesamaan antara perdebatan konstitusional pada 1950-an dan ERA REFORMASI

Pertama, para pendukung amandemen konstitusi menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia yang membuat UUD 1945 berada dalam situasi darurat dan menganggapnya sebagai konstitusi sementara yang memerlukan perubahan kemudian.

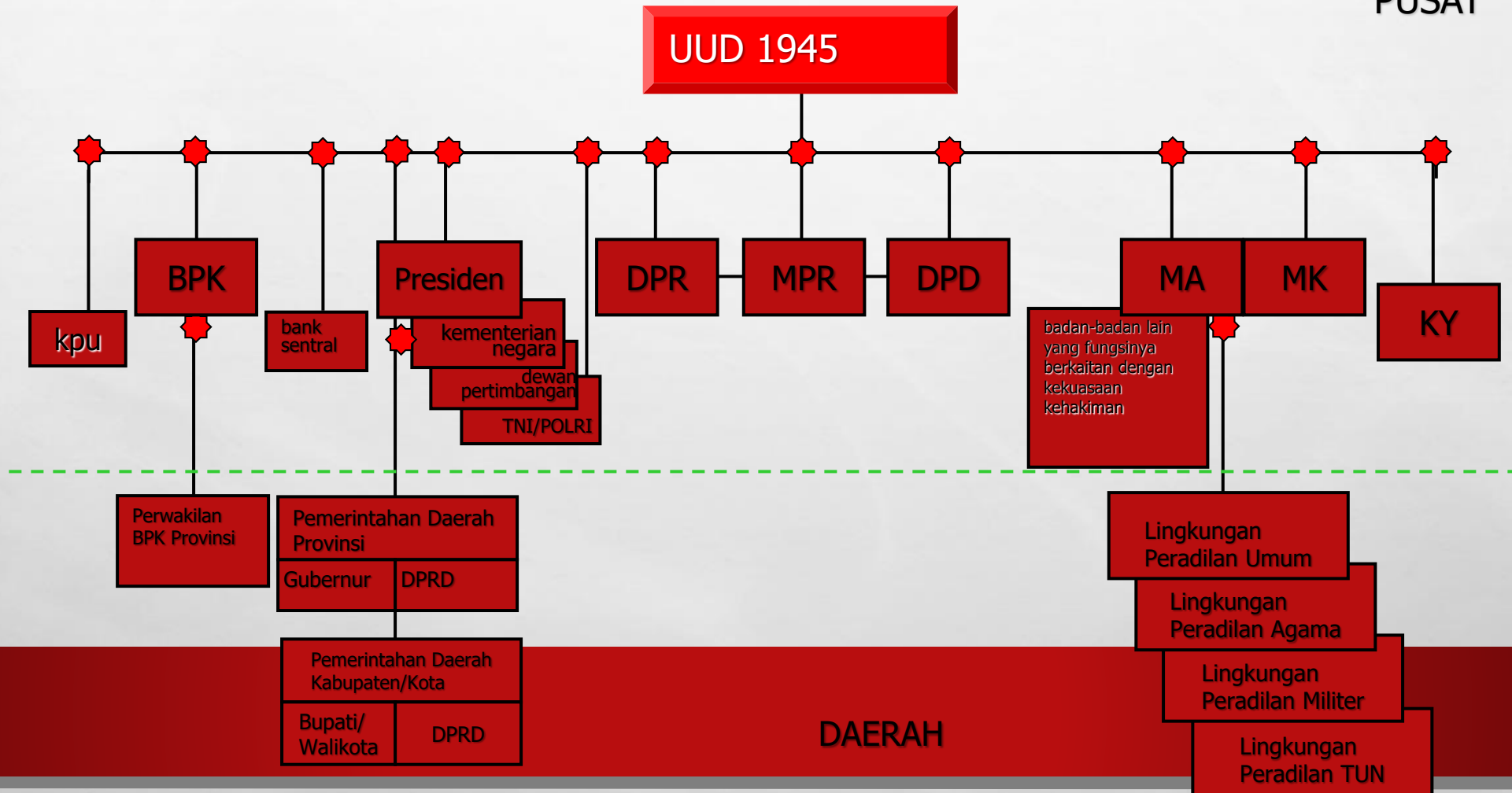
Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan luas pada presiden melebihi parlemen, dan karenanya memungkinkan kekuasaan otoriter.

Ketiga, hanya ada sangat sedikit ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PUSAT



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C Constitution 1945:

- 1) Menguji undang-undang terhadap konstitusi,
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi,
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik,
- 4) Memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar
- 6) Memutus sengketa Pilkada. (Kewenangan Tambahan)

The Guardian of The Constitution

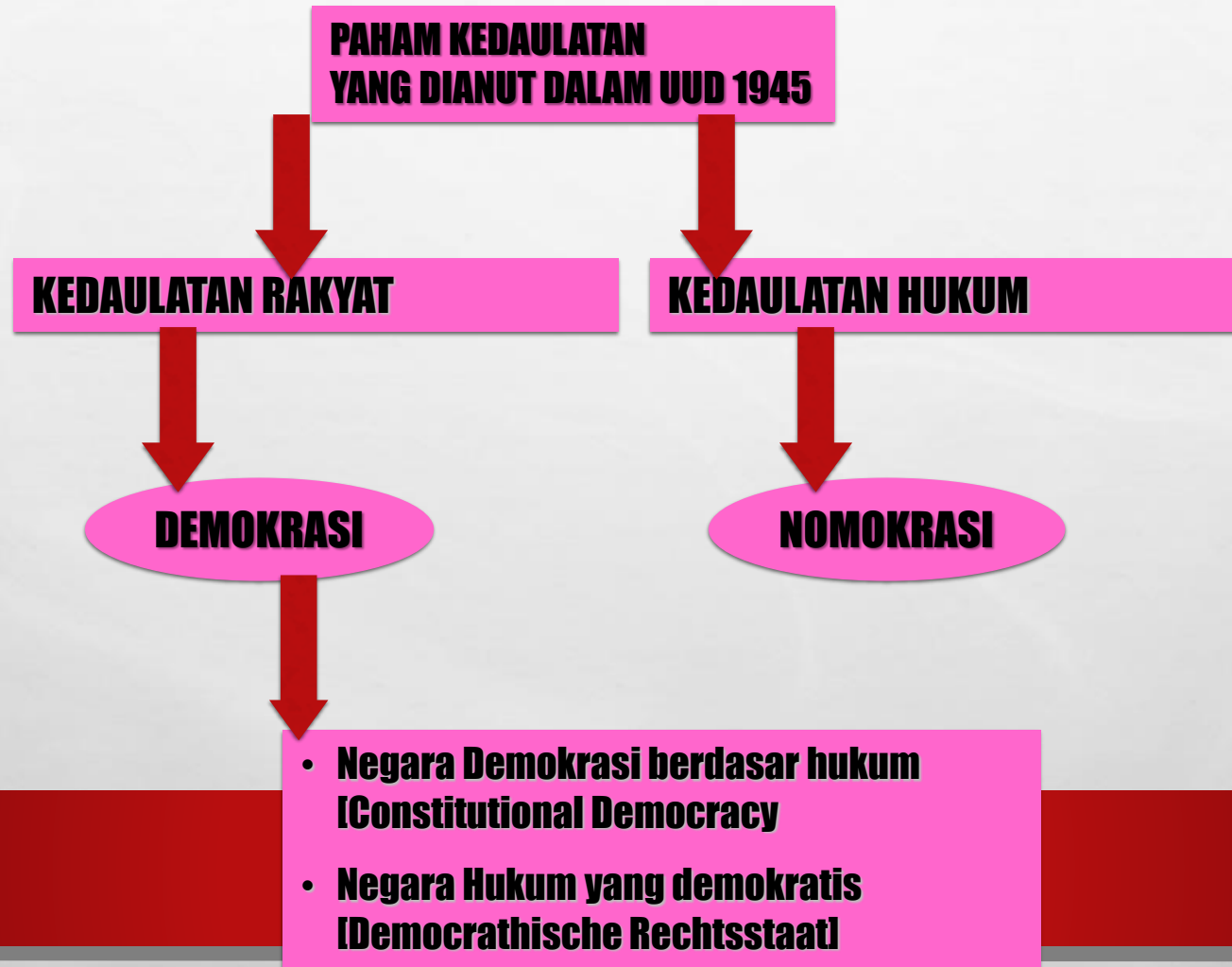
The Final Interpreter of The Constitution

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Citizen's Constitutional Rights

The Protector of The Human Rights

Landasan Teoretis Pembentukan Mahkamah Konstitusi



MK DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- **MAHKAMAH KONSTITUSI RELATIF BISA DIKATAKAN SEBAGAI LEMBAGA BARU DI INDONESIA. LEBIH DARI 20 TAHUN TELAH BERLALU NAMUN MK BELUM BANYAK DIKENAL OLEH MASYARAKAT INDONESIA.**
- **DENGAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENCAPAI 270 JUTA JIWA DAN DENGAN JUMLAH PULAU SEBANYAK 17.000 PULAU, SOSIALISASI MK KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA MANUAL. SEJAK BERDIRINYA, HAKIM KONSTITUSI DAN PEGAWAI MK HAMPIR SETIAP BULAN MENGUNJUNGI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA UNTUK MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG MK.**
- **MASYARAKAT MASIH BELUM MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HAK KONSTITUSIONALNYA .**
- **MASYARAKAT MASIH BINGUNG TENTANG MK DAN MA**
- **HAL TERSEBUT MENYEBABKAN JUMLAH PERKARA DI MK MINIM.**

| | | | |
|----|-----|-----|---|
| 30 | 109 | 139 | Kabul : 3 Tolak : 29 Tidak Diterima : 43 Tarik Kembali : 14 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |
| 50 | 71 | 121 | Kabul : 14 Tolak : 44 Tidak Diterima : 29 Tarik Kembali : 11 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 1 |
| 22 | 121 | 143 | Kabul : 15 Tolak : 53 Tidak Diterima : 37 Tarik Kembali : 18 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 0 |
| 19 | 30 | 49 | Kabul : 2 Tolak : 10 Tidak Diterima : 6 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |

| | | | | |
|------|----|-----|-----|---|
| | | | | Tidak Berwenang : 1 |
| 2015 | 80 | 140 | 220 | Kabul : 25 Tolak : 51 Tidak Diterima : 60 Tarik Kembali : 15 Gugur : 4 Tidak Berwenang : 2 |
| 2016 | 63 | 111 | 174 | Kabul : 19 Tolak : 34 Tidak Diterima : 30 Tarik Kembali : 9 Gugur : 3 Tidak Berwenang : 1 |
| 2017 | 78 | 102 | 180 | Kabul : 22 Tolak : 48 Tidak Diterima : 44 Tarik Kembali : 12 Gugur : 4 Tidak Berwenang : 1 |
| 2018 | 49 | 102 | 151 | Kabul : 15 Tolak : 45 Tidak Diterima : 44 Tarik Kembali : 7 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 2 |

| | | | | |
|------|----|-----|-----|--|
| 2008 | 11 | 36 | 47 | Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 6 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |
| 2009 | 12 | 78 | 90 | Kabul : 15 Tolak : 17 Tidak Diterima : 12 Tarik Kembali : 7 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |
| 2010 | 39 | 81 | 120 | Kabul : 19 Tolak : 21 Tidak Diterima : 15 Tarik Kembali : 5 Gugur : 1 Tidak Berwenang : 0 |
| 2011 | 59 | 86 | 145 | Kabul : 21 Tolak : 30 Tidak Diterima : 32 Tarik Kembali : 9 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 2 |
| 2012 | 51 | 118 | 169 | Kabul : 30 Tolak : 32 Tidak Diterima : 27 Tarik Kembali : 5 Gugur : 2 Tidak Berwenang : 1 |

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

| Tahun | Dalam Proses Yang lalu | Diregistrasi | Jumlah | Amar Putusan |
|-------|------------------------|--------------|--------|--|
| 2003 | 0 | 24 | 24 | Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 2 |
| 2004 | 20 | 27 | 47 | Kabul : 11 Tolak : 10 Tidak Diterima : 10 Tarik Kembali : 4 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |
| 2005 | 12 | 25 | 37 | Kabul : 10 Tolak : 14 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0 |
| | | | | Kabul : 8 Tolak : 8 |

REKAPITULASI PUU



VISI & MISI MK

VISI DAN MISI



Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi

- 1) Memperkuat integritas peradilan konstitusi.
- 2) Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara.
- 3) Meningkatkan kualitas putusan.

UPAYA MK MENDEKATKAN DIRI KE MASYARAKAT

BERPERKARA DI MK GRATIS

TELAH MENGGUNAKAN E-COURT

STAFF YANG AKAN SELALU MEMBANTU MASYARAKAT DENGAN INTEGRITAS YANG TINGGI DAN PROFESIONAL

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PUNYA BANYAK TOOL E COURT : Website, Court Recording System, Video Conference, Case Retrieval System, Case Management System, Digital Archives, Click MK, SIMPELMK, CASE TRACKING SYSTEM, E-GOV, DLL

PUTUSAN DAPAT DI DOWNLOAD 10 MENIT SETELAH SIDANG SELESAI

PUTUSAN GRATIS

E-GOV

SORIALISASI Dashboard Home SKP Hubungi Tim Support Hani Adhani

Rabu, 27 Maret 2019

Persuratan

Pembasthaan 13
Undangan Rapat 2
Surat Tugas 7
Nota Dinas 3

Tautan Aplikasi
Absensi Pegawai

Target Tahunan

Target Bulanan
Kegiatan Kinerja
Rincian Tugas

Ringkasan Tugas Jabatan

Melaksanakan tugas teknis persidangan berupa penyusunan resume persidangan, penyusunan berita acara persidangan, persiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minuta berkas perkara, penyusunan hitbasar putusan, dan tugas lain yang diberikan oleh Panitera Peeganti Tk. I sesuai dengan bidang tugasnya.

Target Tahunan (Tahun 2019)

| No. Kegiatan | AK | Kuantitas | Kualitas | Waktu | Bayar |
|--|----|-----------|----------|----------|-------|
| 1. Persentase penyajian bahan penyusunan konsep putusan/keputusan yang tepat waktu | | 100 % | 100 | 12 bulan | |
| 2. Persentase pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Panitera Muda, Panitera dan Hakim | | 100 % | 100 | 12 bulan | |
| 3. Persentase penyusunan berita perkara yang tepat waktu | | 100 % | 100 | 12 bulan | |
| 4. Persentase penyusunan berita acara yang tepat waktu | | 100 % | 100 | 12 bulan | |
| 5. Persentase minuta berkas perkara yang tepat waktu | | 100 % | 100 | 12 bulan | |
| 6. Persentase penyusunan hitbasar putusan yang tepat waktu | | 100 % | 100 | 12 bulan | |

Kembali ke atas

Kegiatan di bulan berjalan (Data per Rabu, 27 Maret 2019)

| No. Kegiatan | AK | Kuantitas | Kualitas | Keterangan | Catatan |
|---|----|-----------|----------|------------|---------|
| Saudara belum menetapkan kegiatan di bulan berjalan | | | | | |
| Tetapi kegiatan | | | | | |

Kembali ke atas

NO. RINCIAN TUGAS JABATAN

1. Menyusun Telaah Perkara agar memudahkan hakim dalam mengadili perkara dengan cara kegiatan pengkajian teori yang berkaitan dan perbandingan pasal-pasal yang telah diratukan pengujian.
2. Menyusun Telaah Laporan Putusan Benda agar dapat memantau pertembangan pelaksanaan dengan cara memperhatikan tenggang waktu pelaksanaannya.
3. Menyusun notulasi Rapat Permusyawaratan Hakim agar berbagai fakta dan pendapat hukum Jakim konstitusi dalam RPH tercatat dengan baik dengan cara kegiatan pencatatan jalannya RPH.
4. Menjabarkan bahan penyusunan konsep putusan/keputusan agar Majelis Hakim dapat menyusun putusan dengan didukung oleh bahan yang lengkap dengan cara kegiatan penyediaan berita perkara, resume persidangan, berita acara persidangan, dan pendapat hukum hakim konstitusi.
5. Mendampingi Panitera Muda dan Panitera sebagai pembaca akhir konsep putusan/keputusan agar meminimalisir kesalahan penulisan konsep putusan/keputusan dengan cara membaca dan merevisi berdasarkan berita perkara dan hasil pemerkahan dalam sidang pleno hakim konstitusi.
6. Melakukan minuta berkas perkara yang telah diputus agar berkas perkara dan putusan dapat terdokumentasi dengan baik dengan cara melakukan minuta berkas perkara berdasarkan pedoman minuta berkas perkara.
7. Menyusun hitbasar putusan agar substansi putusan mudah diketahui dan dipahami dengan cara menyusun hitbasar putusan sesuai pedoman.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas agar pencapaian kinerja dapat diketahui secara baik dengan cara monitoring dan evaluasi.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitera Muda sesuai dengan bidang tugasnya.

Kembali ke atas

Profil Pegawai
Profil pegawai, jabatan pegawai beserta uraian, rincian kegiatan harian dalam uraian tugas jabatan tersebut, status penilaian SPK dan sebagainya dapat dilihat di sini.

Penilaian Kinerja Pegawai
Halaman Scorean Kerja Pegawai (SKP) tahunan, input capaian SKP Tahunan, input To-Do List (TDL) kegiatan harian, input capaian TDL, kegiatan harian, serta fitur penilaian SKP. Halaman Penilaian Kerja Pegawai dapat diakses di bagian ini.

Pesan Singkat dan Notifikasi
Kirimkan dan atau terima pesan singkat melalui Dashboard Pegawai lainnya terkait komsumsi dan koordinasi pekerjaan serta konfirmasi keterlambatan/kehadiran. Notifikasi serta pengumuman internal dapat pula dilihat di sini.

Butuh Bantuan dari Tim Support PTIK?
Buat tiket untuk untuk mendapatkan bantuan teknis dalam penanganan masalah yang dialami dalam hal akses ke jaringan intranet dan internet, lupa password, aplikasi, printer, scanner, dll dari Tim Support PTIK.

(Dalam Fase Pengancangan)

InternalMK Beranda Search Hani Adhani, S.H., M.H.

Menu Internal

Home Menu Internal

MKRI Mail MKRI Mail (mkrli.id) Westlaw Hein Online Hukum Online Media Monitoring LAKIP

UMK SKP Portal Humas E-Journal Sispim MK SMS Center BRPK

E-Report E-Minutasi SIMJAB Portal Biro SIBANGALAN SIVIKA DS PUTUSAN

© 2014-2018 Kepaniteraan & Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia © Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Copyright © 2018 Mahkamah Konstitusi. All rights reserved. Version 1.0

KESIMPULAN

**MK MEMILIKI PERAN
YANG SANGAT PENTING
DALAM UPAYA
MENINGKATKAN
PAHAM
KONSTITUSIONALISME**

**HARUS ADA UPAYA LAIN AGAR
MASYARAKAT MAU BERBONDONG-
BONDONG MAU CURHAT/MENGAJUKAN
PERKARA KE MK.**

**DIPERLUKAN UPAYA LEBIH SUNGGUH-
SUNGGUH DARI SELURUH STAKEHOLDER
BANGSA UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP KONSTITUSI YANG TIDAK
SEMUYA DIBEBANKAN KEPADA MK.**

**MK HARUS LEBIH
RAMAH TERHADAP
MASYARAKAT
KHUSUSNYA PARA
PENCARI KEADILAN.**

THANK YOU

